SESSION A1
"Challenges, Risks, and Opportunities for Indonesia's Foreign Policy Landscape Under President Prabowo"
Citizen Diplomacy Hall – Conference on Indonesian Foreign Policy 2024

Speakers:

1. **Dr. R. M. Marty M. Natalegawa,** Minister of Foreign Affairs of Republic Indonesia (2009 - 2014)
2. **Prof. Yuddy Chrisnandi,** Professor at Universitas Nasional, Indonesia; Former Ambassador of the Republic of Indonesia to the Republic of Ukraine
3. **Andi Widjajanto,** Senior Advisor Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45)
4. **Prof. Dewi Fortuna Anwar,** Co-Founder of FPCI

Moderator: Sumi Yang, Chief Executive Officer and Host of Nalar TV

Sumi Yang
Saya ingin mengucapkan terima kasih Untuk Mitra sesi siang hari ini yaitu Universitas Kristen Satya Wacana mungkin ada teman-teman yang dari UKSW, halo selamat siang terima kasih untuk supportnya di sesi ini nanti kita akan kasih kesempatan ya bagi teman-teman di *floor* untuk mengajukan pertanyaan jadi simak baik-baik diskusi kita siang hari ini. Siap Bapak Ibu? Adik-Adik mahasiswa siap mengikuti sesi ini? Oke langsung saja kita akan kenalan dengan para panelis kita siang hari ini. Yang pertama adalah Dr. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia 2009-2014. Beliau dalam masa kepemimpinannya telah berhasil mengangkat posisi Indonesia di panggung global Dan beliau merupakan simbol diplomasi yang berwibawa yang kerap membawa suara Indonesia di forum internasional dengan elegan dan juga tegas. Boleh kita kasih tepuk tangannya juga untuk untuk Dr. Marty, boleh, langsung bergabung.

Sumi Yang
Berikutnya adalah Prof. Yuddy Chrisnandi. Beliau adalah guru besar Universitas Nasional, Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Mantan Duta besar Indonesia untuk Ukraina, yang akan membawa perspektif unik dari arena kebijakan luar negeri terutama di tengah konflik Rusia-Ukraina, kita sambut Prof. Yuddy ke atas panggung. Berikutnya adalah Prof. Dewi Fortuna Anwar Beliau adalah peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Dan juga sosok yang membuat acara hari ini mungkin terjadi. Dia adalah Co-Founder Forum Policy Community of Indonesia Kasih tepuk tangannya untuk Prof Dewi. *Last but not least* Bapak Andi Widjajanto Penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45, Gubernur Lemhanas 2022-2023, keahliannya dalam geopolitik dan strategi nasional akan memberikan kedalaman pada diskusi kita hari ini. Boleh saya minta sambutan yang paling meriah untuk para panelis yang telah hadir.

Sumi Yang
Prof. Dewi, *I wanna congratulate you* untuk 10 tahun FPCI luar biasa ternyata sangat impactful Ibu.

Prof. Dewi Fortuna Anwar
Terima kasih banyak dan *it is possible because all of the support of the young people*

Sumi Yang
Saya ingin mengawali diskusi kita hari ini dengan satu pertanyaan yang mungkin boleh dijawab oleh seluruh panelis. Memang ini masih terlalu awal ya kalau kita bilang mau menilai Seperti apa kebijakan luar negeri Presiden Prabowo. Tapi saya ingin meminta pandangannya dulu atau opini dari masing-masing panelis. Setelah satu bulan Kita melihat Pak Prabowo ini gerak cepat ya baru dilantik kemudian mengumumkan kabinetnya langsung melakukan lawatan sampai 16 hari ke beberapa negara Saya ingin memulai dari Prof Dewi dulu, *ladies first*, mungkin boleh memberikan pandangan secara *general* dulu Prof Dewi, bagaimana melihat kebijakan luar negeri Pak Prabowo sejauh ini Prof Dewi silakan.

Prof. Dewi Fortuna Anwar
Terima kasih, Mbak Sumi. Kita semua sependapat sekarang para pengamat bahwa Presiden Prabowo ini memang berbeda dengan Presiden Jokowi dalam hal kebijakan luar negeri. Kalau Presiden Jokowi dulu memang kurang tertarik pada isu-isu internasional kecuali yang berkaitan dengan isu ekonomi sementara Pak Prabowo punya perhatian yang lebih luas dan juga merasa cukup mampu untuk tampil di forum-forum internasional. Jadi saya mencatat dari pertama kali dia diproklamasikan sebagai pemenang, belum dilantik sampai dia dengan dilantik jadi presiden dia mengunjungi 17 negara dan begitu selesai dia dilantik dia mengunjungi sekian banyak negara, ada kunjungan bilateral, kunjungan menghadiri APEC, G20, dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bebas aktif yang lebih aktif, memang secara pribadi presiden memainkan peran yang aktif tidak hanya pada level birokrasi saja itu pertama. Yang kedua dia juga kalau kita perhatikan bebasnya itu betul-betul ditunjukkan dengan pilihan kunjungan ke negara yang boleh dikatakan yang satu *counter balancing* yang lainnya jadi menunjukkan Indonesia tidak ingin memihak ke satu atau yang lainnya, misalnya kunjungan pertama adalah Beijing ketika beliau baru diumumkan jadi pemenang yang kemudian orang bilang apakah Indonesia ini menjadi semakin dekat sekali dengan RRT, tapi begitu dia selesai dari Beijing dia langsung terbang ke Tokyo. Tokyo ini di samping partner ekonomi Indonesia yang lebih lama lagi adalah juga bagian dari persekutuan Amerika Serikat ya jadi dia adalah sekutu militer Amerika Serikat bagian dari negara Quad, jadi ini menunjukkan ada itu memelihara *balancing*. Dan kedua ini dalam kunjungan setelah jadi presiden dia berkunjung ke Cina lagi ini menunjukkan memang kedekatan yang lebih istimewa dengan RRT dan kita akan bicara lebih lanjut nanti tentang apa yang terjadi di Beijing. Tapi setelah dari Beijing ke Washington DC, jadi ke mbahnya sekutu yaitu Amerika. Saya kira boleh kita katakan ini bukan hanya sekedar bebas aktif tapi mungkin bebas dan hiperaktif tantangannya ke depanlah seperti dikatakan Dr. Dino tadi apakah ini

sekedar kehadiran atau sekedar kebijakan atau ada *impact* yang lebih positif ini kira-kira bisa kita nilai dalam diskusi selanjutnya.

Sumi Yang
Baik, saya ingin bergeser ke Pak Andi setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Dewi memang terlihat ada perbedaan gaya begitu ya kalau ketika kita bicara kebijakan luar negeri antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Silakan, Pak Andi.

Andi Widjajanto
Kalau dari perbedaan gaya saya sepakat, tapi sebagai pengamat luar negeri yang ingin saya temukan itu adalah jawaban apakah kita sudah bisa mulai membaca doktrin Prabowo. Ketika Pak Jokowi 2014 menjadi presiden saya berada di tim di dalam, kami merumuskan kebijakan-kebijakan luar negeri berbasis apa yang sudah disampaikan oleh Jokowi-JK ketika debat presiden. Ketika debat presiden Pak Jokowi-JK sudah merumuskan misalnya doktrin poros maritim dunia, sudah mengungkapkan keinginannya untuk memperjuangkan Palestina dan untuk isu-isu baru misalnya saat itu sudah mengungkapkan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di bidang ekonomi digital dan siber, itu sudah dimunculkan. Jadi ketika masa transisi disiapkan dari kemenangan pilpres sampai masuk ke pemerintahan di Oktober 2014, tim ini sudah bergerak untuk kemudian misalnya mengoperasionalkan apa yang menjadi komponen-komponen doktrin poros maritim dunia, waktu itu menjadi lima pilar, menjadi tujuh pilar. Lalu tim ini juga secara terarah diminta untuk menyiapkan Wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki pengalaman dalam dengan negara-negara Timur Tengah yang bisa berbahasa Arab, lalu dimunculkan Wakil Menteri Luar Negeri dengan karakter seperti itu. Jadi ketika di tiga bulan pertama Pak Jokowi menjadi Presiden, hal pertama yang kemudian dimunculkan adalah Pak Jokowi punya doktrin baru poros Maritim Dunia yang berbeda dengan doktrinnya Pak SBY di masa Pak Marty tentang *Zero Enemies, Thousand Friends*, yang berbeda dengan itu.

Di 100 hari pertama Pak Prabowo ini, kami belum menangkap apa yang akan menjadi doktrin Prabowo. Yang saya tangkap dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo atau tadi Pak Sugiono sebagai Menlu, ada satu terminologi unik yang sering diulang. Terminologi itu adalah *good neighborhood*, tetangga yang baik. Apakah kata normatif ini yang akan menjadi doktrin barunya Pak Prabowo ke depan? Itu yang harus dilihat operasionalisasi dari terminologi tetangga yang baik dalam kebijakan luar negeri dalam tiga bulan ke depan.

Sumi Yang
Baik, Prof. Yuddy, silakan.

Prof. Yuddy Chrisnandi
Terima kasih, Mbak Sumi. Sebagaimana beberapa kali ditegaskan oleh Presiden Prabowo sendiri dan Menteri Luar Negeri bahwa Pak Prabowo akan tetap mempertahankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dan kemudian politik luar negeri Pak Prabowo juga

akan menempatkan Indonesia pada posisi berkawan dengan semua negara. Lalu kemudian politik luar negeri Indonesia juga akan lebih mengedepankan diplomasi perdamaian dan kesejahteraan ekonomi. Dalam pandangan saya tidak akan terlalu banyak perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Karena platform kebijakan politik Indonesia untuk menyikapi berbagai macam konflik di dunia seperti yang terjadi saat ini di Timur Tengah tidak berubah.

Prof. Yuddy Chrisnandi
Indonesia tetap memberikan dukungan sepenuhnya pada Palestina. *Whatever the situation will happen*. Lalu kemudian juga terhadap posisi Indonesia kepada masalah yang terjadi di Rusia dan dengan Ukraina, Indonesia memosisikan pada posisi yang netral, tidak terlibat di dalam konflik, tetapi menghormati kedaulatan Ukraina. Lalu kemudian terhadap masalah Laut Cina Selatan, Indonesia juga berada pada posisi yang mencoba menjembatani *dispute* antara Cina dengan negara-negara yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Dan juga banyak hal-hal lain yang menurut pandangan saya tidak akan terlalu banyak berubah karena Indonesia *foreign policy* di bawah Presiden Prabowo nanti akan lebih menitikberatkan kepada kepentingan-kepentingan agenda nasional.

Prof. Yuddy Chrisnandi
Ada 17 program aksi yang menjadi program andalan dari pemerintahan Presiden Pak Prabowo. Dari 17 program agenda pembangunan Presiden Pak Prabowo ini, saya melihat ada lima, ya, lima program yang seluruhnya ini sangat terkait dan penting pada pembangunan ekonomi di dalam negeri yang membutuhkan dukungan hubungan internasional.

Sumi Yang
Saya ke Pak Marty. Pak Marty ini berulang-ulang Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit dan satu musuh itu terlalu banyak. Bagaimana memaknai *statement* ini kaitannya dengan kebijakan luar negeri Presiden Prabowo ke depan.

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Saya kira dari pernyataan seperti tadi tersirat tekad Indonesia menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai masalah di dunia ini. Masing-masing kita di ruang ini akan mampu dengan sangat *eloquent* dan sangat lugas menyampaikan, memaparkan berbagai kondisi tantangan yang dihadapi dunia pada saat ini, namun bagaimana kita meresponsnya adalah tantangan yang kita hadapi jadi *to speak beyond description* permasalahan-permasalahan tapi mencoba tampil dengan solusinya. Jelas dalam waktu yang sangat singkat ini pemerintahan Bapak Presiden Prabowo sudah menunjukkan kemampuannya *at the very least to be present*. Jadi terlihat secara agendanya, kegiatannya*, hitting the ground running*, langsung terlihat tampil aktif.

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Namun tentunya dalam politik luar negeri tidak cukup kita menilai berdasarkan kegiatan agenda menghadiri sidang A, B dan C. Melainkan kita melihatnya dari segi *impact*, dari segi apakah kepemimpinan Indonesia yang harus kita raih kita harus raih melalui kebijakan politik luar negeri yang cemerlang itu menunjukkan efeknya, menunjukkan dampaknya. *On this issues,* ini tentu sesuatu yang sifatnya proses*. It's too early*, terlalu dini untuk kita mencapai suatu kesimpulan mengenai satu bulan terakhir. Yang pasti *as a basic minimum requirement* paling tidak Indonesia *is seen to be present* di berbagai forum penting ini, tapi kita masih menunggu bobot apa, *message* apa yang kita ingin tampilkan.

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Kalau yang kehendak, prioritas, cita-cita dan kehendak Indonesia saya kira kita semua sudah mendengarnya dengan baik. Tapi kan *we live in a world of sovereign states*, kita hidup dalam dunia yang negara-negara yang berdaulat, yang memiliki tekad dan rencananya masing-masing. *Things happen* terjadi di dunia ini yang harus kita sikapi. Jadi kita tidak bisa menyatakan apa yang menjadi prioritas kita pasti akan bisa dicapai. *We have to implement it to the reality of the world as it is.*

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Dan ini saya kira yang kita akan pantau karena tidak ada *automatic pilot*. Kita harus bisa menerapkan yang menjadi rencana itu dalam keadaan sebenarnya. Dan inilah menurut sama kami, kita masih harus menunggu bagaimana pelaksanaan politik luar negeri itu.

Sumi Yang
Saya kembali lagi ke Prof Dewi tadi, memang terlalu dini kita menilai seperti apa arah kebijakan di bawah Presiden Pak Prabowo. Tapi sudah ada sinyal-sinyal yang ditunjukkan lewat lawatannya ke beberapa negara yaitu *present* tadi, kehadiran kita di kancah di panggung internasional. Sebelum kita bicara tentang bagaimana kita berperan dan berkontribusi kita perlu membaca juga mengenai kondisi global saat ini apa yang menjadi risiko tantangan yang harus kita cermati. Prof. Dewi apa sebetulnya tantangan terbesar melihat situasi geopolitik saat ini bagi Indonesia.

Prof. Dewi Fortuna Anwar
Kita dunia semakin menghadapi tantangan uang tidak baik-baik saja jadi terlalu pendek sebenarnya waktu untuk berbicara, kita berbicara tentang tantangan *traditional security* kita juga berbicara tentang *non-traditional security*. Dulu setelah Perang Dingin berakhir Francis Fukuyama pernah berkata *the end of history* seolah-olah sebuah negara itu bergerak ke arah yang sama akan menjadi liberal demokrasi, *open economy* dan sebagainya. Ternyata sejarah sudah kembali ya jadi tantangan utamanya itu kembali ke dunia politik di mana kekuatan menjadi utama lagi di mana hukum internasional menjadi semakin lemah tidak diperhatikan jadi konflik mulai terjadi lagi, perang yang kita perkirakan tidak akan terjadi antar negara, Eropa

terjadi perang kembali tentu invasi Rusia terhadap Ukraina, di Timur Tengah pun demikian. Konflik menjadi isu dan kita di Indo-Pacific ini terutama di Laut Cina Selatan di utara itu ada *flash points* yang bisa *mentrigger* konflik. Jadi perang itu menjadi salah satu ancaman.

Kedua *geopolitical rivalry*, kita kembali bercerita orang berbicara tentang *multipolarity* banyak muncul pusat-pusat kekuatan ekonomi yang semakin menyebar, tetapi di dalam kompleksitas *multipolarity* atau *multiplex* ada muncul juga bipolaritas jadi ada dua *superpower* US-China *rivalry* ini juga mulai menjadi super struktur dari tatanan global. Jadi US-China rivalry itu akan semakin menjadi isu apalagi dengan muncul kembalinya Presiden Trump yang akan menghantam Cina dengan tarif yang sangat tinggi dan *decouple* dan sebagainya. Yang ketiga ini boleh kita katakan nontradisional *securities*, isu *environment* ini adalah *existential threats* bagi kita semua banyak yang tidak percaya termasuk Presiden Trump dan timnya tidak percaya dengan *climate change* disebabkan oleh manusia tetapi apakah dia percaya apa tidak isu *climate change* ini menjadi sangat nyata dan saya kira generasi muda menjadi sangat *concern* karena isu *climate change* ini dan seperti juga konflik ini terkait juga dengan *food security* karena tidak terprediksi apakah akan ada *harvest* yang memadai, sementara konflik seperti yang terjadi di Rusia-Ukraina berdampak terhadap *food supply*, Ukraina lumbung dari gandum, Rusia adalah tempat kita membeli pupuk dan sebagainya. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah tantangan dari teknologi, ada *artificial intelligence* ada *computing* ada *biotech* dan sebagainya. Dan Indonesia kita masih berbicara tentang *poverty dan hunger* sementara di dunia di sana orang berbicara tentang superkonduktor dan sebagainya, kita juga harus mampu berbicara dalam hal-hal seperti itu.

Sumi Yang
Saya ingin masuk ke *traditional security* tadi pertanyaan untuk Pak Andi karena latar belakang Anda di Lemhannas. Perang ini masih menjadi ancaman bagi kita. Kalau kita lihat di kawasan Indo-Pasifik ini sebetulnya Indonesia ini kan posisinya sangat strategis, bisakah kita lebih berperan lagi untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik ini?

Andi Widjajanto
Kerangka akademik saya itu selalu *neorealis*, struktur realis. Jadi pertanyaan dasarnya adalah mengapa kehadiran hegemoni negara besar tidak mampu menciptakan perdamaian? Mengapa perang tetap terjadi pada saat negara besar benar-benar *impose* sistemnya dalam satu kawasan? Jadi apa yang salah dengan hegemoni yang dilakukan oleh misalnya Amerika Serikat. Dalam pemahaman saya Amerika Serikat menjadi hegemoni mestinya bisa menciptakan perdamaian karena dia punya aliansi militer global.

Aliansi militer globalnya ternyata tidak bisa membuat Rusia masuk ke Ukraina, aliansi militer globalnya tidak bisa membuat misalnya Korea Utara bertingkah laku sesuai dengan keinginan rezim nuklir Amerika Serikat. Aliansi militer global Amerika Serikat ini diperkuat dengan kehadiran senjata nuklir. Senjata nuklir mestinya menghadirkan teori penangkal yang membuat

negara-negara itu berpikir dua tiga kali kalau mau macam-macam dengan Amerika Serikat, tidak kejadian. Ukraina yang jelas-jelas didukung Amerika Serikat, Rusia masuk-masuk saja itu. Korea Utara yang jelas-jelas ditekan oleh Amerika Serikat masih saja nakal dengan membangun senjata nuklir.

Yang ketiga dari Amerika Serikat adalah Amerika Serikat sebetulnya mengandalkan PBB, tapi kemudian Amerika Serikatnya sendiri yang tidak konsisten menggunakan PBB, yang dalam satu tahun terakhir ini semua upaya kita untuk membahas masalah-masalah genosida yang dilakukan Israel misalnya di Gaza di Veto oleh Amerika Serikat. Yang keempat sistem yang juga diciptakan oleh Amerika Serikat yang kelihatannya tidak berfungsi secara efektif adalah institusi-institusi ekonomi finansial global yang dia ciptakan. Ada IMF, ada Bank Dunia, ada ADB untuk di Asia, ada juga misalnya WTO. Pada saat Amerika Serikat mestinya mengusung liberalisasi ekonomi, sementara yang terjadi sejak Trump adalah dimulainya perang dagang, dimulainya perang teknologi. Bahkan kita sudah tahu bahwa nanti Trump memerintah Januari 2025, tarif antara Amerika Serikat dengan China akan gila-gilaan dimainkan sebagai instrumen politik ekonominya Amerika Serikat.

Terakhir instrumen Amerika Serikat yang juga tampaknya sedang ditantang hari ini adalah penggunaan mata uang dolar sebagai global *currency* yang kemudian ditantang. Ketika Pak Sugiono melakukan kunjungan luar negeri pertamanya menghadiri BRICS di Rusia, salah satu isunya adalah bahwa BRICS akan mengeluarkan mata uang sendiri untuk menantang mata uang global, dolar. Apakah kemudian dolar ini akan menjadi kelemahan utama Amerika Serikat terutama karena kelemahan-kelemahan internal dari ekonomi Amerika Serikat yang tidak bisa pulih sepenuhnya sejak Covid-19. Jadi Amerika Serikat tampaknya harus menjelaskan atau harus kembali menilai mengapa perangkat-perangkat atau saya menyebutnya pilar-pilar hegemoni mulai dari aliansi militer, nuklir, PBB, sistem keuangan global, dan juga dolar tidak mampu menciptakan perdamaian.

Sumi Yang
Saya ke Prof. Yuddy. Prof. Yuddy dengan pengalaman Anda sebagai mantan duta besar di tengah konflik Rusia-Ukraina. Bagaimana Anda melihat dampak dari konflik ini terhadap diplomasi Indonesia. Kita ingat pada saat pak Jokowi masih menjabat. Sempat berupaya untuk memediasi. Menurut Anda ini langkah yang konkret yang perlu diteruskan oleh Presiden Prabowo ke depan atau seperti apa Prof?

Prof. Yuddy Chrisnandi
Di awal terjadinya *full scale invasion* Rusia terhadap Ukraina hanya beberapa bulan 24 Februari dimulai tanggal 30 Juni 2022, Presiden Jokowi adalah presiden Asia pertama yang berkunjung ke kota Kiev pada saat itu dan membawa misi perdamaian yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuannya dengan Presiden Rusia, Putin. Sayangnya langkah-langkah yang lebih konkret di dalam menjembatani konflik Rusia dan Ukraina ini tidak dilanjutkan oleh Indonesia. Pada saat

itu sudah menjadi satu modal dasar Indonesia sebagai *middle power* untuk berperan. Walaupun kemudian ada pertemuan G20 di Jepang, Presiden Jokowi bertemu kembali lalu Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo juga satu tahun yang lalu bertemu dengan Presiden Zelensky di Shangri La Dialogue di Singapura dan seterusnya. Namun langkah-langkah yang konkret Indonesia sebagai *middle power* itu belum nyata kalah oleh misalnya Turki dengan *grand* inisiatifnya. Kalah dengan Qatar atau Saudi Arabia yang coba mempertemukan kepentingan-kepentingan Rusia dan Ukraina untuk berdamai. Namun satu hal bahwa sikap politik luar negeri Indonesia ini konsisten tetap menghormati integritas wilayah, menghormati kedaulatan, dan meminta untuk dihentikannya perang, dan mencari solusi dengan cara-cara yang damai. Itu konsistensi kita. Namun konsistensi sikap politik luar negeri saja tidak cukup menempatkan kita memiliki peran sebagai *middle power* dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Kenapa hal ini penting? Karena amanat konstitusi kita, kenapa kita merdeka salah satunya kita akan turut serta di dalam upaya menciptakan ketertiban dunia. Jadi sebetulnya yang harus dilakukan Indonesia adalah menjadi juru damai atas setiap adanya konflik yang terjadi di dunia ini. Apalagi perang. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang cinta damai.

Prof. Yuddy Chrisnandi
Negara yang secara konstitusional memiliki cita-cita untuk terwujudnya dunia yang damai. Jadi Indonesia seharusnya terpanggil dalam setiap terjadinya konflik-konflik dunia. Laut Cina Selatan harusnya kita segera mengambil langkah-langkah yang konstruktif untuk mengatasi itu. Palestina dengan Israel atau Lebanon juga harus lebih konkret bantuan-bantuan kemanusiaan dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Termasuk juga menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga. Kita punya kesempatan untuk melakukan itu.

Sumi Yang
Saya ke Pak Marty. Pak Marty memang ini isunya banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi saya ingin dalami mengenai rivalitas antara Amerika dan China Apalagi setelah Trump terpilih kembali. Sudah pasti prediksinya ini akan makin tegang hubungan antara kedua negara. Bagaimana Pak Marty melihat dengan prinsip-prinsip dasar kita bebas aktif ini bisa berperan mengambil peluang di tengah-tengah rivalitas kedua kekuatan besar ekonomi dunia ini tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif kita.

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Sebagaimana disampaikan tadi dalam beberapa kali kesempatan persaingan geopolitik ini menurut nikmat kami sudah merupakan suatu keniscayaan sesuatu yang tidak dapat dihindari Apakah Amerika, Tiongkok, tapi juga ada negara-negara lain misalnya India dengan Tiongkok dan negara-negara lain di Asia Utara misalnya. Sekarang pilihan kepada kita adalah apakah kita semata pasif, *trying to survive*, hanya ingin menyelamatkan diri dari kenyataan ini atau kita aktif. Kalau menurut hemat kami secara pribadi pilihannya jelas kita harus secara proaktif mencoba bukan hanya selamat agar selamat dari kontestasi ini melainkan mencoba mempengaruhinya dengan membuat misalnya *Rules of Behavior*, *Code of Conduct,* bagaimana

persaingan-persaingan ini bisa dilakukan tanpa harus menghasilkan peperangan terbuka. Inilah yang selama ini dilakukan Indonesia berpuluh tahun. Kita tidak diam diri, kita proaktif, *we shape and molded the regional architecture*, kita ciptakan ASEAN, ASEAN Community, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit dan seterusnya. Ini bukan tanda-tanda negara yang pasrah yang kita yang penting kita selamat. Kita proaktif mencoba mempengaruhi keadaan itu.

Dalam kaitan inilah menurut hemat kami melihat Amerika-Tiongkok seperti saat ini misalnya kita perlu menawarkan konsep-konsep yang cemerlang, yang relevan bagaimana kita bisa menciptakan kembali trust, rasa saling percaya bisa meminimalisir *the risk of unintended conflict,* konflik yang tidak direncanakan, *crisis management capacity*. Ini adalah tadi pertanyaan tentang bagaimana politik luar negeri kita sampai saat ini. *This is the manifestation,* kita tidak bisa semata mengumbar ini rencana kita. *We have to deliver,* kita harus menunjukkan apa yang kita ingin capai dan Amerika dengan Tiongkok saya kira suatu keniscayaan, misalnya kalau kita menyebutkan konsep *Peaceful Settlement of Disputes,* apapun yang kita sengketakan ada komitmen untuk menyelesaikan sengketa itu melalui jalan-jalan damai. Saya kira hal-hal seperti ini yang disuarakan oleh Indonesia, tidak semata tahan badan mengharapkan badai ini akan berlalu karena ini *is a permanent turbulence.* Badai tidak akan berlalu, *this is the fact of life.* Jadi kita harus mencoba bukan hanya menavigasi, bukan hanya berdiam diri dan mudah-mudahan kita selamat, kita harus merubah dinamikanya. *I think that is what Indonesian Foreign Policy has been about,* bukan pasif bukan netral bukan tidak pilih apa tidak pilih antara A atau B tapi kita menciptakan dinamika yang baru demikian.

Sumi Yang
Oke boleh berikan tepuk tangan ini banyak *insight* sekali dari Pak Marty. Kembali ke Prof Dewi tadi ini bukan proaktif lagi bukan aktif lagi tapi hiperaktif yang ditujukan oleh Pak Prabowo di awal kepemimpinannya, kalau Prof Dewi bisa kasih masukan kira-kira langkah konkret apa jadi jangan hanya sekedar hiperaktif saja tapi betul-betul bisa berkontribusi dan menghasilkan sesuatu tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk Indonesia Prof Dewi.

Prof. Dewi Fortuna Anwar
Ya terima kasih. Saya ingin lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Marty tadi bahwa Mas Andi seorang realis akan melihat bagaimana konstelasi power ya tetapi kita harus akui bahwa kalau dari segi real power capacity, dari segi kemampuan militer kita, kemampuan ekonomi kita itu masih jauh kalau kita menunggu sampai kita memiliki kapasitas tersebut. Indonesia tidak mungkin melaksanakan hal-hal yang lebih luar biasa. Tapi kenyataannya waktu kita masih miskin sekalipun Indonesia sudah menjadi tuan rumah dari Asian African Conference, kita sudah menggalang koalisi antara negara-negara baru merdeka kita mengatakan kepada Superblock itu, dua blok tersebut, kami tidak ingin memilih satu atau lain tetapi ada jalan tengah non blok, apa artinya, *the power of idea* yang sudah dibuat oleh Indonesia itu penting sekali untuk dilanjutkan dan selalu diperkuat. Jadi kita kekuatannya bukan pada kekuatan realis tapi pada kekuatan idealis pada kekuatan normatif. Jadi Indonesia dianggap sebagai *normative*

middle power, norms entrepreneurs, dan salah satu tantangan utama adalah sebelum kita go-global adalah memperkuat jaringan di ASEAN kembali. Ketika kita berbicara bagaimana Indonesia bisa tidak hanya sekedar navigasi untuk selamat tetapi bisa menjadi juga bagian dari solusinya orang akan selalu melihat ASEAN. ASEAN memainkan peran sentral di Indo-Pasifik ini tetapi ASEAN mengalami krisis di dalamnya ada krisis dari semakin beragamnya dengan anggota yang semakin banyak tentu semakin beragam. ASEAN itu jadi sulit mencari titik temu, ini yang diharapkan dari Indonesia. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN bukanlah kepemimpinan yang *hegemonic*, itu dihindari oleh Indonesia kalau kita *hegemonic* negara-negara tetangga kita yang kecil akan takut dan curiga dan justru mereka akan mencari perlindungan dari saudara-saudara tua yang lain. Jadi kita justru kalau Pak Harto dulu *Tut Wuri Handayani* kalau sekarang mungkin katanya *Ing Ngarso Mangun Karso* - berada di tengah-tengah memberi semangat. Jadi bagaimana kita kembali memperkuat ASEAN. Pak Marty mengakatan, “Does ASEAN matter?.” Yes, tetapi kita harus membuat ASEAN itu kuat dan ini *leadership* Indonesia sangat-sangat ditunggu di sini.

Sumi Yang
Pak Marty ada yang mau ditambahkan?

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Saya hanya ingin menggarisbawahi lagi bahwa diplomasi, dialog adalah kekuatan Indonesia, kekuatan Indonesia dalam berbagai masalah. Dan saya sendiri juga secara pribadi mohon maaf karena ini tema besar dari konferensi ini, agak sedikit ada *troubled* dengan istilah *middle power.*

Sumi Yang
Apa itu?

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Karena kalau saya percaya setiap negara apakah kecil, apakah *middle*, apakah besar, *we are all sovereign equal*. Kita sama negara penduduknya satu 10 juta, 20 juta, satu miliar dan kita bekerja keras untuk memperoleh kesetaraan itu. Mengapa sekarang kita membeli agenda seolah-olah dunia ini ada sertifikasi, ada yang *major, super*, ada yang *middle*, ada yang *small*, apalagi *power*, *power* disini dimaksud adalah kemampuan untuk mempengaruhi *outcome currency* semakin berubah, tidak saja *military power,* tapi ada *soft power,* ada diplomasi, *issue-dependent*, setiap isu ada konstelasinya sendiri, *climate change* konstelasinya apa, dinamikanya apa, *pandemic, global financial issues.* Kita harus hati-hati jangan merayakan seolah kita sekarang telah menjadi *middle* karena dengan demikian kita bisa diberikan *ceiling* yang kita tidak bisa dobrak. Saya merasa Indonesia lebih daripada *middle*, *we are a sovereign power, we are a independent power,* tapi saya tidak harus merasa bahwa kita dibatasi, bahwa kita adalah tengah.

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Kalau yang dimaksud tengah adalah kemampuan powernya, kalau tengah dimaksud adalah orientasi politik luar negerinya, menjembatani, dan seterusnya saya setuju karena itulah *forte* dari Indonesia, *bridge builder*, *in a way they for middle* tapi bukan netral, tapi kalau *power* yang dimaksud adalah sertifikasi, saya yang pertama akan melawan konsep itu.

Sumi Yang
Jadi jangan pernah mengecilkan diri atau jangan-jangan batasan itu kita buat sendiri Pak Marti bukan orang lain.

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Maksudnya itu, kita berjuang untuk menyatakan *all states all equal*, *sovereign and equal* dari yang kecil, tengah dan terbesar. Kenapa sekarang kita membeli argumentasi bahwa kita harus, ini pundak kita sekarang kita sudah menjadi *middle*, kita adalah *sovereign independent power,* itulah Indonesia.

Sumi Yang
Baik. Kalau mau tepuk tangan boleh silakan teman-teman. Saya ke Pak Andi. Perang ini kan macam-macam. Ada perang senjata, kemudian salah satu yang jadi ancaman terbesar itu adalah perang *cyber* yang juga akan kita hadapi. Kalau kita tidak fokus pada teknologi maka kita akan kemudian ketinggalan seperti itu. Bagaimana Pak Andi melihat ke depan kita harus lebih berperan dalam hal ini? Silakan.

Andi Widjajanto
Ya saya cerita pengalaman saya sebagai gubernur Lemhannas, saat itu saya menjadi wakil Indonesia ke *Cyber Summit* yang membicarakan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam ranah militer. Ada hampir 50 negara hadir disitu, lalu kami Indonesia tidak punya posisi apa-apa tentang bagaimana mengatur, waktu itu temanya *responsible AI for military use*, kami tidak punya. Indonesia dari Kemlu tidak ada, dari Kementerian Pertahanan tidak ada, dari Lemhannas juga belum melakukan kajian dalam, bagaimana mengatur itu? Jadi kita berusaha membaca negara-negara besar itu memainkan isu ini seperti apa? Lalu kita kemudian menangkap tiga, negara-negara seperti Amerika Serikat itu menginginkan agar isu ini dibiarkan berjalan saja untuk melihat bagaimana teknologi akan berkembang siapa yang kemudian akan lebih unggul. Jadi ketika itu acaranya di Den Haag, itu koordinasi antara Kemlu dan Kemhan, jadi ketika masuk ke ruangan itu kita sudah melihat sponsor sponsor-sponsor teknologi-teknologi besar untuk *summit* tersebut.

Jadi kalau Amerika Serikat, Belanda, dengan Korea Selatan mungkin karena keunggulan teknologi membiarkan ini isu mengambang tidak ke mana-mana lalu mengusulkan agar isu ini dibahas dalam forum-forum multilateral seperti yang dilakukan di Den Haag, forum keduanya kemudian dilakukan di Seoul. Lalu ada Cina, Cina rupanya sejak tahun 2018 sudah

mengusulkan agar isu ini dibahas dalam kerangka seperti membahas senjata, seperti membahas *disarmament* dan menginginkan dibahasnya melalui mekanisme PBB *Security Council,* lalu PBB Security Councilnya seperti menyiapkan semacam konferensi khusus yang nanti akhirnya mengatur AI dan cyber. Ketika sudah mendengar dua pandangan begini, saya berbicara dengan Ibu Menlu, saya berbicara dengan Pak Menhan, Pak Prabowo, apa sebetulnya posisi Indonesia? Apakah mau ikut posisi Cina, mengaturnya secara keras dalam konteks *disarmament*, ya pengaturan senjata, proliferasi senjata, atau diambang seperti Amerika Serikat. Dan saat itu kita benar-benar tidak ada posisi.

Itu mungkin yang saya tadi ingin juga sambung ke Pak Marty, Kadang-kadang isunya itu memang lepas konteks dari peringkat power, benar-benar lepas dari situ. Waktu itu saya ingat Filipina, Filipina itu delegasinya unik, yang lain-lain itu dari pertahanan atau luar negeri, Filipina delegasinya dari Kementerian Perdagangan, Saya kaget kenapa dari Kementerian Perdagangan dan menolak 100% menolak pengaturan AI *cyber* di rezim internasional. Dia ingin lepaskan saja ke pasar bebas. Nah hal-hal seperti ini yang harus kita pelajari baik-baik, karena banyak isu-isu yang benar-benar ketika saya mendiskusikannya di dalam, kita betul-betul belum punya posisinya, kita tidak tahu untuk isu ini kita bertingkah laku sebagai *great power* kah, sebagai *middle power* kah, atau *no position*? Akhirnya Indonesia saat itu saya diberi waktu tiga menit untuk berbicara, saya bilang Indonesia *no position* untuk isu *responsible AI for military use* karena benar-benar tidak ada, dan 32 negara posisinya akhirnya *no position* seperti Indonesia karena itu adalah Konferensi pertama.

Sumi Yang
Ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu kita harus ke mana, itu kembali lagi apa sih prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh Indonesia untuk menentukan kita mau ke mana Pak Andi?

Andi Widjajanto
Ya prinsip paling dasar adalah melihat kebutuhan kita, *national interest* kita apa, masalah yang kita hadapi seperti apa. Tapi kalau misalnya seperti AI untuk kebutuhan militer ya isunya benar-benar baru di pertahanan kita, di militer kita belum ada penggunaan AI untuk kita berperang itu benar-benar belum ada. Kita benar-benar baru punya mendirikan pusat *cyber* baru benar-benar punya satuan *cyber* dan seterusnya benar-benar baru organisasi kerangka kalau kita seandainya ada serangan *cyber* masih bergantung kepada BSSN belum bergabung kepada Mabes TNI atau Kementerian Pertahanan kita benar-benar nol atau kalau saya bilangnya malah negatif, satu di isu itu malah negatif, satu karena itu harus hati-hati untuk mempelajarinya lalu secara cepat membangun kapasitas membangun kemampuan minimal untuk memahami lika-liku isunya. Isu itu mungkin belum akan relevan ke kita, saya meramalkannya sampai tahun 2027 belum akan relevan untuk pertahanan kita, tapi nanti begitu tiba-tiba ada kecenderungan penggunaan AI, penggunaan *cyber* untuk menekan kebijakan-kebijakan terutama luar negeri dan pertahanan terkait dengan konflik-konflik, baru isu

itu akan relevan. Tapi waktu saya di Den Haag itu, itu benar-benar pengalaman berharga di mana saya masuk dan tidak ada sama sekali posisi yang bisa ditawarkan Indonesia untuk isu yang untuk negara-negara seperti waktu itu di samping saya ada Menhan Ukraina, di samping saya ada Menhan Estonia, ada Menhan Finlandia yang posisinya sudah sangat-sangat jelas kuat, karena mereka memang perkembangan teknologinya sangat-sangat bagus.

Sumi Yang
Dalam lawatannya ke luar negeri, beberapa waktu lalu, Pak Prabowo menunjukkan keinginan untuk Indonesia bergabung dengan BRICS dan OECD. Prof. Yuddy mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Tadi Anda sebutkan bahwa *Foreign policy* nya Pak Prabowo ini terlihat fokus pada kepentingan agenda nasional. Mungkin Prof. Yuddy bisa sedikit memberikan pandangan, apa sebetulnya untungnya kita bergabung dengan BRICS dan juga OECD dan bagaimana kita bisa tetap konsisten menjaga *foreign policy* kita dengan prinsip bebas aktif itu tadi Prof?

Prof. Yuddy Chrisnandi
Saya berpandangan, sudah tepat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk ikut di keduanya. Karena kita ingin mendapatkan keuntungan untuk kepentingan nasional kita melalui kerja sama ekonomi internasional. Bukannya tidak tahu kita bahwa OECD dengan 38 negaranya itu mengcover kurang lebih 62 persen GDP dunia. Sementara BRICS kurang lebih 30-35 persen dengan yang relatif baru keanggotaannya. OECD sudah dibentuk sejak tahun 1961 dan diakses terus.

Indonesia tahun 2012 atau 2014 Pak Marty tolong dikoreksi, baru ingin ikut dengan OECD. Namun akselerasi keterlibatannya di OECD ini mungkin punya birokrasi yang panjang ya, jadi agak lama sehingga Indonesia harus jadi *observer* dulu beberapa tahun lalu kemudian sekarang juga baru aksesi dalam proses menunggu. Padahal kan sebenarnya kita sudah ingin sekali masuk di dalam organisasi itu untuk kepentingan kerja sama ekonomi Indonesia sendiri. Dengan adanya BRICS ini kita langsung datang ke Kazan, langsung bisa didaftarkan walaupun belum menjadi anggota penuh baru sebagai apa istilahnya kita sudah diundang dan betul-betul *welcome* ya kelihatan BRICS ini lebih *welcome* daripada OECD. Seharusnya kalau saya, Pak Marty, Mas Andi, atau Ibu Dewi Fortuna ini pemimpin dari negara OECD, G7 misalnya *the leaders of* G7, saya langsung ambil cepat itu harusnya Indonesia supaya dalam kontestasi geopolitik internasionalnya Indonesia berada dalam satu pilar bersama. Seharusnya begitu. Tapi kan OECD ini tidak melihat itu. Bagi Indonesia sendiri, keduanya penting untuk kepentingan nasional Indonesia sendiri. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal dari tujuh belas program prioritas pembangunan presiden, Pak Prabowo, lima program yang berkaitan langsung dan kerja sama internasional itu untuk kepentingan nasional seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, terus kemudian peningkatan kapasitas pertahanan, lalu kemudian akses terhadap kesehatan, dan juga pengembangan teknologi informasi bagi kualitas pendidikan kita.

Nah, jadi kembali lagi dua-duanya bagi Indonesia penting dan dua-duanya bagi Indonesia perlu untuk ikut serta di dalam semua organisasi-organisasi kerja sama ekonomi internasional. Karena keduanya menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Saya melihat tidak ada lagi negara yang sangat super power sekarang. Amerika bukan satu-satunya negara yang menjadi hegemoni dunia. Ada China yang diperkirakan oleh Goldman Sachs pada tahun 2045 nanti akan menjadi negara terkaya di dunia melewati Amerika Serikat dan Indonesia diperkirakan menjadi negara keempat setelah China, Amerika, India. Dan itu tentu akan merubah konstelasi super power. Rusia dulu disebut super power, tapi sekarang bukan lagi super power. Kalau Rusia super power tidak perlu memerangi Ukraina. Demikian Mbak Sumi.

Sumi Yang
Baik, karena keterbatasan waktu saya akan menutup diskusi kita ini dengan satu pertanyaan untuk seluruh panelis dan juga mungkin sedikit berbeda untuk Pak Marty, karena Pak Marty sebagai mantan Menlu. Kalau misalnya Pak Marty saat ini masih menjabat sebagai Menlu apa kira-kira usulan langkah konkret yang bisa Bapak berikan kepada pemerintah untuk tetap konsisten dengan prinsip bebas aktif namun sekaligus memperkuat posisi tawar kita pak di kancah internasional. Silakan pak Marty.

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Saya saat ini sudah sedang menikmati masa pensiun. Jadi bukan pada tempatnya bagi kami untuk memberikan nasihat atau pemasukan kepada pemerintah saat ini. Kecuali mungkin hanya menggarisbawahi bahwasanya diplomasi itu adalah suatu profesi, suatu keahlian yang bagi para diplomat Kementerian Luar Negeri mereka sudah tekuni 20 tahun, 30 tahun dengan berbagai pengalaman yang dibangun selama itu. Sehingga dalam pelaksanaan politik luar negeri, setiap pemerintahan seyogianya betul-betul mencoba untuk memperoleh manfaat dari profesional *advice* yang dapat diberikan oleh rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri karena merekalah yang hari demi hari terus-menerus memiliki *institutional memory, institutional knowledge*, kemampuan untuk membaca ruangan, dinamika, suatu perundingan, untuk bisa mengamankan politik luar negeri Indonesia. Tadi disampaikan berbagai forum yang kita akan gabung atau tidak gabung, tekad dan niat Indonesia ke depannya. Memang diperlukan, diperlukan presisi *laser sharp definition of our national interest,* kepentingan kita itu apa dan kita perjuangkan secara sistematik terus-menerus dan dalam kaitan ini sekali lagi kalau mohon maaf karena kami datangnya memang dari Kementerian Luar Negeri, saya ingin *speak on behalf of the professional diplomats, make them work for you*. Manfaatkan keahliannya, pengalamannya, dan seterusnya. Kalau tidak memang *the world is very tough*. Kalau kita tidak memiliki menggunakan semua kemampuan yang kita miliki maka akan sulit. Misalnya dengan *joint statement* yang telah dicapai antara Indonesia dengan Tiongkok baru-baru ini. Meskipun kami secara pribadi tentu tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan di belakangnya, banyak pertanyaan yang timbul di benak kami.

Kalau kita berbicara tentang *joint development* di area of overlapping claims antara Tiongkok dengan Amerika dengan Indonesia. Pertanyaan yang timbul adalah di mana *overlaping claimsnya* itu? Karena dalam pihak Tiongkok hingga saat ini tidak pernah memberikan koordinat dari *nine dash line* nya itu, tidak pernah ada koordinatnya. Bagaimana kita bisa mengetahui di mana *overlaping claimsnya*? Undang-Undang kita sendiri, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengenai wilayah negara Indonesia menyebut secara gamblang negara-negara di mana kita menjadi tetangga. Ada 10 negara, Tiongkok bukan salah satu negara itu. Jadi bagaimana kita bisa memiliki *overlapping claims* dengan suatu negara yang dalam undang-undang tahun 2008 nomor 43 secara gamblang disebut tidak disebut Tiongkok sebagai tetangga kita. Pertanyaannya adalah *joint statement* ini kan merupakan seharusnya hasil dari pembahasan semua *stakeholders*, para ahli kita semua. Itu hanya contoh kalau kita saya tidak ada jawaban, saya tidak ada pertanyaan. Tapi mudah-mudahan dalam setiap tahap, setiap permasalahan gunakan, manfaatkan, *deploy, employ, empower* para diplomat kita karena merekalah yang mau bekerja untuk itu. *That is what they are paid for. That is why they are civil servants* dan diplomat Indonesia. Gunakanlah mereka.

Sumi Yang
Prof Yuddy, nanti dilanjutkan Pak Andi dan Prof Dewi juga karena keterbatasan waktu. Mungkin singkat saja Prof Yuddy terakhir, *what next*, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kebijakan luar negeri kita.

Prof. Yuddy Chrisnandi
Indonesia ini kan sudah memiliki modal dasar diplomasi internasional ya, sebagai negara terbesar di ASEAN, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dia ikut organisasi konferensi Islam, sebagai negara demokrasi keempat terbesar di dunia, sebagai negara yang secara geografis itu sangat strategis, sebagai negara dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa dibutuhkan oleh dunia. Nah, kelima modal dasar diplomasi kita ini seharusnya memiliki satu kekuatan *bargaining power* untuk Indonesia terlibat mendamaikan dunia yang sedang konflik pada saat ini. Jadi yang disebut dengan politik bebas aktif atau kemudian netral atau nonblok bukan berarti kita diam karena ada prinsip-prinsip internasional yang kita sudah bersepakat untuk ikut di dalamnya. Pertama, piagam PBB, artikel 1, 2, 3 dan 4. Yang kedua, kita juga mengakui hukum laut internasional UNCLOS 1982. Kita juga ikut dalam Konvensi Vienna tentang hubungan diplomatik dan seterusnya. Nah, itu semua menjadi pegangan Indonesia untuk mengambil peran. Peran yang signifikan untuk menengahi Rusia dan Ukraina. Bagaimana menghentikan perang? Karena Indonesia ini negara yang bisa diterima oleh keduanya. Kita memiliki hubungan diplomatik dan sejarah yang cukup panjang dengan Rusia, Begitu pun kita juga memiliki hubungan diplomatik sejarah yang cukup panjang dengan Ukraina. Kita bisa menjadi penengah. Begitu pun juga di Middle-East. Kita baik dengan Lebanon. Kita baik dengan Palestina. Kita mendukung Palestina. Kita juga baik dengan Iran yang dianggap sebagai sponsor daripada Hamas dan Hizbullah, kita juga baik dengan Amerika Serikat, kita walaupun tidak punya hubungan diplomatik, tapi kita baik-baik saja dengan Israel,

kita bisa mengambil peran di situ. Apalagi di Laut Cina Selatan yang tadi disinggung oleh Pak Marty. Kita tidak punya masalah apa pun *dispute* dengan China. Kita tidak ada masalah dengan negara-negara yang *dispute* juga dengan China. Sebagai pemimpin ASEAN kita bisa mengambil satu jalan tengah untuk mengurangi ketegangan di situ sehingga kapal-kapal perang Amerika Serikat tidak perlu ada juga di Laut Cina Selatan. Dan juga tidak perlu juga militer daripada Cina menguasai Laut Cina Selatan. Inilah peran ke depan Indonesia yang kita harapkan dan akan menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia akan peran politik luar negerinya.

Sumi Yang
Baik, *thank you* Prof. Yuddy. Silakan, Pak Andi.

Andi Widjajanto
Terobosan-terobosan yang ingin dilakukan oleh pemerintah baru, Presiden, Menteri Luar Negeri baru itu harus kemudian mengecek kembali posisi-posisi dasar rujukan utama Indonesia untuk beberapa isu. Tadi Pak Marty sudah menyampaikan tentang *overlapping claim* misalnya untuk Laut Cina Selatan. Prosesnya sudah sangat panjang, kerja senyap para diplomat itu sudah sangat panjang, kita di DOC 2011, mulai COC 2018, kemarin di Laos itu baru saja selesai perundingan ke-45 membahas COC. Jadi dalam 2018-2024 45 kali kita perundingan. Tentunya diplomat-diplomat yang di Laos yang tingkat direktur kalau di Kemlu, pertanyaan utama yang harus mereka jelaskan di Laos dalam tiga hari kemarin adalah Apa maksud Indonesia dengan kata *overlapping claim*? Itu pertanyaan utamanya.

Akan ada hal-hal baru yang harus kemudian dicek ulang oleh Bapak Presiden, Menlu untuk tidak menggoyahkan kredibilitas, komitmen Indonesia untuk beberapa hal-hal dasar. Jadi misalnya begini, saya meramalkan Trump untuk cepat menyelesaikan masalah Rusia-Ukraina akan menawarkan gencatan senjata berdasarkan status quo okupasi teritorial efektif, akan menawarkan itu. Itu artinya Indonesia harus mengakui bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia sejak seribu hari yang lalu, sampai nanti entah kapan gencatan senjatanya itu dilakukan, itu de facto wilayah Rusia. Bertentangan tidak dengan prinsip kita tentang teritorial, tentang invasi.

Hal seperti itu harus kita cek kembali apa sih posisi dasar kita. Katakanlah kalau seandainya Trump nanti inaugurasi Januari 2025, lalu Trump ingin fokus menyelesaikan masalah Israel Palestina, Saya meramalkan Trump akan kembali menggunakan Abraham Accord sebagai rujukan utamanya. Semua negara yang mau terlibat untuk menyelesaikan Israel-Palestina tanda tangan ikut Abraham Accord, kalau tidak, tidak diajak oleh Trump. Untuk kita artinya apa? Artinya kita saat itu juga, detik itu juga mengakui Israel melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kita harus mengecek kembali ke hutang kita ketika Konvensi Asia Afrika Dasar Sila, bahwa Israel adalah satu-satunya hutang Asia Afrika, Dasasila yang belum Indonesia penuhi, satu-satunya. Dan kita tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebelum kita mendapatkan kemerdekaan penuh Palestina, tapi bukan ini arah yang akan

dilakukan oleh Trump misalnya. Itu tiga contoh saya, tiga contoh tentang Laut Cina Selatan, ada negosiasi ke-45, ada tentang nanti de facto teritorial, tentang nanti misalnya Abraham Accord dan Kemlu yang sebagian besarnya adalah kerja senyap harus benar-benar diyakinkan untuk kembali menggunakan pedoman rujukan dasar yang selama ini menjadi posisi utama Indonesia di ruang diplomasi.

Sumi Yang
Terakhir Prof Dewi mungkin apa yang menjadi aset terbesar kebijakan luar negeri Indonesia yang bisa kita maksimalkan?

Prof. Dewi Fortuna Anwar
Ya aset ya kita punya *track record* ya kita sudah memiliki modal dasar seperti apa yang dikatakan tadi dan karena posisi Indonesia selama ini yang *Thousand Friends Zero Enemies*, kita aktif kita bisa dipercaya begitu dan ini yang sangat penting tapi saya ada ingin mengangkat ya karena sebagai peneliti itu berbeda dengan mantan Menlu yang tidak mau membeli nasehat kepada pemerintahan sekarang, peneliti itu selalu memberikan nasehat yang tidak diminta sama sekali jadi itu tugas kita ya jadi saya kira saya hanya ingin mengangkat tiga isu saja sebagai barangkali yang bisa kita sampaikan. Pertama seperti dikatakan tadi *foreign policy begins at home,* jadi *deliverables* itu pertama adalah dia harus membumi di Indonesia sendiri, apa kepentingan nasional utama yang ingin dicapai dan ini yang belum disebut. Pak Prabowo ini menginginkan pertumbuhan ekonomi 8%. Bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi 8% itu tidak mungkin hanya dicapai dengan modal di dalam negeri saja di dalam hal ini kebijakan luar negeri perlu kita pakai sedapat semaksimal mungkin seoptimal mungkin untuk mendatangkan investasi, untuk mendatangkan mencari pasar baru, untuk membuka peluang-peluang kegiatan ekonomi yang lainnya, sebab kalau seandainya tidak *deliver* itu akan kehilangan konstituen di dalam negeri ini yang akarnya terjadi ada *Brexit*, ada populisme dan sebagainya. Akan ada penolakan dari rakyat sendiri ini sibuk di luar apa hasilnya bagi kami. Yang kedua tidak bisa hanya Indonesia *first, only for* Indonesia. Kita ada di pembukaan undang-undang dasar kita harus aktif terlibat di dalam perdamaian dunia dan sebagainya, jadi ada *public goods* tetapi kita juga harus mengukur kapasitas Indonesia itu *Global player,* atau *regional player,* maunya sih kita ada dimana-mana. Tetapi kalau harus memprioritaskan, prioritaskan *region* kita, lingkungan ASEAN ini tidak baik-baik saja ada isu Myanmar, ada isu Laut Cina Selatan, macam-macam isu ini Indonesia harus berdiri berada di depan. Sebelum kita mendamaikan Israel dan Palestina coba tangani itu isu di Myanmar dan sebagainya. Yang ketiga yang paling penting yaitu adalah kehati-hatian. Ini ada risiko ketika Presiden kita itu adalah *foreign policy president* sangat gemar melakukan *high* diplomasi kalau membuat kesalahan nanti tidak ada shieldnya, tidak ada tameng jadi perlu prinsip kehati-hatian yang luar biasa, sebab diucapkan lagi main-main itu bisa dianggap sebagai kebijakan dalam hal ini memang peran dari diplomat *core,* peran dari ahli-ahli internasional itu sangat-sangat penting. Jangan kita diberi nasehat oleh orang di Washington lain kali Indonesia itu ya libatkanlah *international expert* nya. Ini kan teguran yang saya kira tidak perlu. Jadi ke depan kita harap prinsip kehati-hatian karena di dalam hubungan internasional apalagi dalam satu *statement, language matters.* Makanya negosiasi setiap koma

setiap titik setiap kata-kata itu dipilih jadi seperti kata Pak Marty tadi gunakanlah ahlinya juga untuk mendraf konsep, membaca dulu konsep tersebut. Terima kasih.

Sumi Yang
Berikan pertentangan untuk seluruh panelis kita untuk *insight* hari ini Karena keterbatasan waktu Kita hanya akan berikan kesempatan kepada dua penanya. Silakan Langsung saja boleh panitia dibantu dengan *mic*. Wow ini antusias sekali yang mau bertanya banyak nih, tapi kita cuma pilih dua saja ya boleh sebelah sini kayaknya tadi paling dulu. Yang di depan yang berkaca mata silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya.

Rizky, Penanya
Baik, terima kasih Mbak Sumi, Pak Marty, Pak Yuni, Pak Andi dan juga Bu Dewi. Saya Rizky dari Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional. Saya ada dua pertanyaan terkait dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia. Tadi mungkin sudah terjawab juga terkait dengan *overlaping claim* Laut Cina Selatan, di mana Presiden Prabowo mengunjungi China beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya kita apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo karena langsung menjadi panglima diplomasi Indonesia.

Namun, menurut saya, *overlapping claim* terkait dengan Laut Cina Selatan itu juga menimbulkan dilema buat negara-negara tetangga kita. Meskipun sebenarnya kita itu tidak bersinggungan langsung, tapi ada negara-negara tetangga kita yang bersinggungan. Itu bagaimana caranya agar tidak menimbulkan *enemy* yang baru Tadi kalau konsepnya seribu teman terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak Itu bagaimana pendapat bapak? Kemudian pertanyaan kedua Indonesia dikategorikan atau kita mengategorikan diri kita sebagai *middle power*. Terkait dengan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, warga Palestina. Kalau kita berharap ke *hegemon* Amerika Serikat, sepertinya agak kurang bisa karena apa pun yang terjadi di UN itu selalu di veto oleh Amerika Serikat. Tapi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu kita disalib sama China, yang berhasil mempersatukan 14 faksi yang ada di Palestina. Hamas dan Fatah itu berhasil disatukan. Indonesia yang sudah berjuang sejak awal, itu tiba-tiba di salib Itu kira-kira kapasitas seperti apa yang harus kita tingkatkan agar kita juga bisa bermain dalam tingkatan yang seperti itu. Terima kasih

Sumi Yang
Baik terima kasih Rizki Kita jawab dulu ya, nanti untuk yang pertanyaan kedua, *keep it short,* karena keterbatasan waktu. Mungkin Pak Marti bisa menjawab dulu pertanyaan pertama tadi terkait *overlaping claim* di Laut Cina Selatan, bagaimana kita harus berhati-hati supaya kemudian tidak menciptakan *enemy* baru pak Marti?

Dr. R. M. Marty M. Natalegawa
Saya sendiri sekali lagi saya sampaikan saya sebagai orang awam dari luar hanya melihat ke dalam tidak memiliki semua informasi yang seharusnya saya miliki. Jadi saya juga sama dengan rekan kita, ada pertanyaan saja di benak kami saat ini. Meskipun tadi pertanyaannya adalah menyangkut kemungkinan dampaknya terhadap negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada saat ini kepedulian saya lebih ke dalam negeri dahulu, ke Indonesianya dulu. Karena satu pertanyaan yang masih ada di benak kami yang mungkin ini hanya wujud dari keterbatasan kami sendiri adalah tadi itu bagaimana menyinkronkan pernyataan yang menyatakan kita akan membuat sebuah *joint development* di *overlaping claims*, *areas of overlaping claims*, sementara undang-undang kewilayahan kita sendiri yang menyebut secara gamblang negara-negara di mana kita bertetangga, ada Malaysia, ada Singapura, ada Palau, Timor Leste, Papua Nugini, India, Vietnam dan seterusnya, ada 10 kalau saya tidak salah, tidak ada satu pun disebut Tiongkok.

How can we have overlaping claim terhadap suatu negara yang berdasarkan undang-undang bukan tetangga kita. Jadi hanya pertanyaan yang betul-betul sangat awam dan pencerahan. Kalau yang disampaikan teman kami, rekan kita tadi itu juga penting karena selama ini Indonesia mengenai masalah Laut Cina Selatan menempatkan dirinya sebagai fasilitator karena kita tidak terlibat secara langsung dalam masalah *conflicting claims* di sana. Kalau sekarang kita sudah menyatakan kita juga ada *overlaping claims* dengan Tiongkok maka posisi *to be above the frey* di atas perseteruan itu akan sedikit pudar karena sekarang kita bagian dari yang sedang bertikai itu. Jadi untuk saat ini saya juga, saya *I am the last person*, *I have no answer.*

Tapi saya banyak pertanyaan tapi terutama yang tadi pertama yang itu Muhammad kami sangat hakiki karena kita membuka satu vista, satu pemikiran baru karena kita selama ini menentang klaimnya Tiongkok itu jelas lantang lugas dan kita ulang kembali berkali-kali. Tapi di saat yang sama kita menyebut ada *overlapping areas* plural, *areas of overlapping claims*. Di mana ini? Karena kita menurut undang-undang tidak bertetangga dengan Tiongkok. *I think this deserve clarification* supaya kita jangan menimbulkan ketidakpastian demikian

Sumi Yang
Saya langsung saja minta Prof. Yuddy mungkin yang menjawab untuk pertanyaan kedua tadi ya kapasitas apa yang bisa kita tingkatkan supaya suara kita bisa lebih didengar lagi di kancah internasional. Silakan Prof.

Prof. Yuddy Chrisnandi
Saya kebetulan pernah menjadi anggota Komisi 1 DPR ya lima tahun penuh menjadi mitranya Pak Marty dan rekan-rekannya di Kementerian Luar Negeri. Kemudian saya juga bertugas di Ukraina merangkap Georgia dan Armenia. Sangat dekat dan erat sekali dengan seluruh diplomat Kementerian Luar Negeri kita. Secara kapasitas sumber daya manusia ini sangat luar

biasa. Di Kementerian Luar Negeri ini memiliki pemahaman tentang geopolitik yang sangat detail dari semua wilayah Afrika, Amerika, Eropa, Timur Tengah, semuanya ada.

Oleh karena itu sumber daya manusia yang memahami geopolitik dunia ini yang ada di kemerdekaan di luar negeri harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan analisa, pemikiran-pemikiran, prediksi-prediksi situasi yang akan datang terhadap pergerakan setiap negara dunia yang akan membawa risiko kepada negara lainnya. Jadi dengan cara itulah, dengan cara melibatkan itu, kita akan selalu *aware* dengan persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi untuk yang memerlukan satu posisi politik Indonesia, seperti tadi masalah di Timur Tengah. Kenapa kok jadi China yang mempertemukan seluruh faksi-faksi yang bertikai di Palestina dan Lebanon. Kenapa tidak Indonesia? Padahal Indonesia sejak era Presiden Soekarno itu menjadi pelopor kemerdekaan Palestina.

Nah itu karena kita kurang melibatkan ya *stakeholder-stakeholder* yang memahami persoalan ini dan juga melibatkan tokoh-tokoh yang bisa mengakses terhadap pihak-pihak berkonflik di mana kita bisa mengambil peran. Tidak hanya di Timur Tengah, di Rusia dan Ukraina kita pun bisa melakukannya. Apalagi tadi di Laut Cina Selatan sangat bisa kita melakukannya. Gunakan kemampuan *human resources* yang memiliki pengalaman dan kemampuan ini untuk terlibat di dalam *foreign policy* pemerintah kita.

Sumi Yang
Baik, terima kasih Prof. Yuddy. Sayang sekali waktu kita habis ya pertanyaan dihabiskan oleh Rizky tadi Jangan sebel ya. Mas Risky pulang hati-hati ya. Baik kita akan tutup diskusi kita hari ini boleh saya minta tepuk tangannya yang paling meriah Untuk para panelis kita hari ini. Terima kasih Pak Marty, Prof Yuddy, Pak Andi, dan juga Prof. Dewi untuk *insight* siang hari ini. Kita akan meminta para panelis untuk bisa berfoto bersama untuk mengabadikan momen ini.